



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun Alun Utara Nomor 07 Telp. (0334) 881146 – 881255 Fax. 881146
LUMAJANG – 67316

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.2/52/427.72/2024

TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
FORMASI TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka bersama ini Pemerintah Kabupaten Lumajang membuka kesempatan bagi Tenaga Non-ASN terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Formasi Tahun Anggaran 2024 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;

9. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK untuk JF guru tahun 2024;
10. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 570 Tahun 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
11. Surat Edaran Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024.

II. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN:

Jumlah kebutuhan sebanyak **653 formasi** dengan rincian:

1. Tenaga Guru : 487 formasi
2. Tenaga Kesehatan : 77 formasi
3. Tenaga Teknis : 89 formasi

Rincian formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

III. PERSYARATAN UMUM

1. Pelamar merupakan Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
3. Usia pelamar:
 - a. Untuk Jabatan Fungsional Guru paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
 - b. Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan;

9. Kualifikasi pendidikan yang dipilih pada SSCASN harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki (Program studi yang dipersyaratkan mengacu pada nomenklatur SK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi);
10. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Lumajang;
12. Pelamar yang melamar PNS tidak dapat melamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam periode tahun yang sama;
13. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan;
14. Pelamar yang diketahui melamar pada lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan, atau menggunakan lebih dari 1 (satu) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Pelamar tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi pengadaan;
16. Pelamar tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai;

IV. PERSYARATAN KHUSUS

1. Berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 347 Tentang Mekanisme Seleksi PPPK TA 2024 Kebutuhan PPPK diperuntukan bagi pelamar:
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
 - b. Tenaga non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non-ASN)
2. Pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang pada saat pendaftaran;
3. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik;
4. Penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud angka 3 diberlakukan secara berurutan bagi:
 - a. Pelamar prioritas (Pelamar Prioritas Guru untuk jabatan Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 untuk Jabatan Bidan Katergori Keahlian);
 - b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
 - c. Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN; dan
 - d. enaga non ASN yang aktif bekerja di Instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi Guru di Instansi Daerah).
5. Urutan kelulusan sebagaimana dimaksud ketentuan nomor 4a pada pelamar prioritas guru adalah sebagai berikut:
 - a. Guru Eks THK-II
 - b. Guru non-ASN
 - c. Lulusan PPG
 - d. Guru Swasta
6. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan (tidak lulus seleksi), dapat dipertimbangkan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu;

7. Kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 11 dapat diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI.
8. Berdasarkan Surat Edaran Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 27 September 2024 Nomor : 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 Perihal Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK TA 2024, disampaikan bahwa :
 - a. BKN belum memiliki data terkait pelamar pada angka 4 huruf d serta keterbatasan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan sebaran calon pelamar tersebut, sehingga perlu diberikan alokasi waktu yang cukup untuk dapat mengakomodasi seluruh calon pelamar (tenaga non ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Sehubungan hal tersebut, Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK TA 2024 dibagi menjadi 2 periode, yaitu:
 - 1) Tahap 1**

Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Formasi Tahun 2024 bagi pelamar :

 - a) Pelamar prioritas (Pelamar Prioritas Guru untuk jabatan Guru dan D-IV Bidang Pendidik Tahun 2023 untuk Jabatan Bidang Kategori Keahlian);
 - b) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
 - c) Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN;
 - 2) Tahap 2**

Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Formasi Tahun 2024 bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
9. Tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lumajang paling singkat 2 tahun terakhir secara terus menerus dapat mendaftar pada OPD lain sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
10. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar PPPK dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya sesuai dengan format surat keterangan disabilitas (*format terlampir*); dan
 - b) Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar;
 - c) Berkoordinasi dengan Panitia Seleksi Daerah terkait seleksi administrasi.
11. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK terdiri atas:
 - a. **Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru**
 - 1) Pelamar yang dapat melamar PPPK Jabatan Fungsional (JF) Guru terdiri dari:
 - a) Pelamar Prioritas

Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF guru di Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya. Dalam hal pelamar prioritas berasal dari luar instansi pemerintah atau sekolah swasta, disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi/lembaga/yayasan. (format **harus sesuai** dengan lampiran pengumuman ini)

- b) Guru Eks. Tenaga Honorer Kategori II (eks. THK-II)
guru eks. THK-II adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada BKN dan aktif mengajar di Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 - c) Guru Non-ASN
Guru non-ASN di instansi daerah terdiri atas:
 - i. pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada Pemerintah Kabupaten Lumajang; atau
 - ii. guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (*Dapodik*) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar.
- 2) Pelamar pada seleksi PPPK JF guru tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 (empat) dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK untuk JF guru tahun 2024.
- 3) Pelamar seleksi PPPK JF guru yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a) Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru bahasa indonesia atau JF guru bahasa inggris;
 - b) Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan; dan
 - c) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru seni budaya keterampilan.

b. Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan

- 1) Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF Kesehatan Tahun 2024 terdiri dari:
- a) Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II)
eks THK-II adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
 - b) Tenaga non-ASN
Tenaga non-ASN terdiri dari :
 - i. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
 - ii. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
 - c) Pelamar D-IV Bidan Pendidik yang lulus tahun 2023 adalah pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-IV Bidan Pendidik yang dinyatakan lulus seleksi PPPK tahun 2023 pada JF Bidan kategori keahlian

- 2) Pelamar pada seleksi PPPK JF Kesehatan Tahun Anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 570 Tahun 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
- 3) Pelamar wajib memiliki kualifikasi pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan persyaratan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/2427/2024 tentang Penjelasan Nomenklatur;
- 4) Pelamar hanya dapat melamar pada unit kerja atau perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang tempat bekerja saat mendaftar;
- 5) Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama; dan
 - b) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- 6) Pelamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar, dengan ketentuan :
 - a) STR diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - b) STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.
 - c) STR harus linier dengan ijazah dan jenjang jabatan yang dilamar;
 - d) Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024;

c. **Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Teknis dan Pelaksana**

- 1) Pelamar untuk PPPK Teknis terdiri dari :
 - a) Eks THK-II
Eks THK-II adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lumajang
 - b) Tenaga non ASN, terdiri dari :
 - i. pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lumajang; atau
 - ii. pegawai yang **aktif** bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lumajang paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.

- 2) Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan:
 - a) paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana;
 - b) paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; dan
 - c) paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.

V. JADWAL PELAKSANAAN

Berdasarkan Surat Edaran Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 27 September 2024 Nomor : 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 Perihal Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK TA 2024.

Jadwal Tentatif sesuai dengan ketentuan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas)

1. **TAHAP I** (Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam PangkalanData (*Database*) BKN)

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah (*)	2 s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	5 s.d. 11 November 2024
8	Penarikan data final	12 s.d. 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	24 s.d.31 Desember 2024
14	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
15	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

2. **TAHAP II** (Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Gurudi Instansi Daerah)

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah (*)	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	22 s.d. 31 Mei 2025

Keterangan:

(*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024

(**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Semua pendaftaran dilaksanakan melalui SSCASN dan tidak ada pengiriman berkas fisik kepada panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Lumajang Formasi Tahun 2024;
2. Pelamaran dilakukan melalui laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id/> tata cara sebagai berikut :
 - a. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses pendaftaran seleksi Pengadaan;
 - b. Selanjutnya pelamar dapat melakukan registrasi pembuatan akun kemudian login dan mengisi data diri sesuai prosedur pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - c. Pelamar hanya dapat membuat akun sebanyak 1 (satu) kali;
 - d. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - e. Ukuran, bentuk dan isi file yang diunggah menyesuaikan keterangan dan kolom pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - f. Dokumen yang di unggah harus sesuai dengan persyaratan, terbaca jelas, tidak terpotong dan lengkap;

- g. Berdasarkan surat Plt. Kepala BKN nomor 6655/B-SI.02.01/SD/E/2024 tentang penggunaan meterai pada seleksi PPPK TA 2024, bahwa diperkenankan memakai meterai elektronik (e-meterai) dan meterai konvensional (tempel) pada dokumen unggahan surat lamaran maupun surat pernyataan 5 poin. Bagi pelamar yang menggunakan meterai palsu/yang sudah digunakan akan mengakibatkan tidak memenuhi syarat pada tahap seleksi administrasi;
- h. Pelamar mengunggah persyaratan pendaftaran berupa pindai/*scan* dokumen asli (bukan dokumen *copy*) dan berwarna sebagai berikut :
- 1) Surat lamaran ditujukan kepada **Bupati Lumajang** di Lumajang, diketik menggunakan komputer, bermeterai 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam mengenai meterai untuk meterai tempel (format **harus sesuai** dengan lampiran pengumuman ini);
 - 2) Surat pernyataan 5 poin diketik menggunakan komputer, bermeterai 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam mengenai meterai untuk meterai tempel (format **harus sesuai** dengan lampiran pengumuman ini);
 - 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 4) Pas foto terbaru dengan rasio 4x6, berwarna, berpakaian formal (bukan kaos), tampak depan, berlatar belakang warna merah polos, posisi portrait. Pas foto bukan editan, tidak dipercantik dan posisi tegak karena akan dicocokkan dengan *camera face recognition* pada saat Seleksi Kompetensi. Ketidakcocokan wajah pada pas foto hasil upload dengan *camera face recognition* dapat menyebabkan peserta tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
 - 5) Ijazah asli (bukan Surat Keterangan Lulus) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - a) Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan profesi melampirkan ijazah S.1 dan Profesi;
 - b) Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis melampirkan ijazah S.1 Kedokteran, Profesi dan Spesialis;
 - c) Untuk kualifikasi pendidikan SLTA/SMA Sederajat mengunggah lembar depan ijazah.
 - 6) Transkrip nilai asli (bukan Transkrip Nilai Sementara) dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - a) Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan profesi melampirkan ijazah S.1 dan Profesi;
 - b) Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis melampirkan ijazah S.1 Kedokteran, Profesi dan Spesialis;
 - c) Untuk kualifikasi pendidikan SLTA/SMA Sederajat juga mengunggah lembar balik/ belakang ijazah.
 - 7) Surat Keterangan Pengalaman Kerja minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 8 (delapan) tahun, ditandatangani pejabat yang berwenang sebagai berikut :
 - a) JF Guru ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
 - b) JF Teknis dan Pelaksana ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja contoh kepala OPD/Lurah/Camat;
 - c) JF Kesehatan ditandatangani oleh :

- i. Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - ii. Kepala Rumah sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - iii. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon III; atau
 - iv. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II.
- d) Surat Keterangan Pengalaman Kerja dapat lebih dari satu, jika pelamar mempunyai pengalaman kerja lebih dari satu OPD/ Unit Kerja.
(format **harus sesuai** dengan lampiran pengumuman ini);
- 8) Surat Keterangan Aktif Bekerja (Bukti Pengalaman Kerja di Instansi) tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Bagi pelamar yang TIDAK terdaftar dalam *database* non-ASN BKN, masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus dan sampai saat ini (format **harus sesuai** dengan lampiran pengumuman ini);
- 9) STR khusus bagi pelamar untuk jabatan tenaga kesehatan;
- 10) Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 8 ditambah dengan:
 - a) Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan format surat keterangan disabilitas (*format terlampir*);
 - b) Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar; dan
 - c) Berkoordinasi dengan Panitia Seleksi Daerah terkait seleksi administrasi.
- 11) Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional sesuai Keputusan Menteri PAN RB No 391 Tahun 2024 (*sesuai lampiran pada pengumuman ini*). Khusus jabatan Pemadam Kebakaran yang mempersyaratkan Surat Pernyataan Bukan Disabilitas dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
- 12) Pelamar **DIWAJIBKAN** untuk memilih **TITIK LOKASI BKN JEMBER** agar mempermudah pengawasan dan pembagian jadwal tes Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2024;
- 13) Pelamar **WAJIB** membaca Tata Cara Pendaftaran yang dapat diunduh pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- 14) **Semua tahapan pendaftaran disesuaikan dengan SSCASN.**

VII. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi Pengadaan PPPK terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu :

1. Seleksi Administrasi
 - a. Seleksi administrasi berdasarkan dokumen pelamar yang telah diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - b. Seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada website <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan persyaratan yang ditentukan oleh panitia seleksi;
 - c. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://bkd.lumajangkab.go.id/>.
2. Seleksi Kompetensi

Seleksi Kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosiokultural, dan wawancara yang dilaksanakan dengan menggunakan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

VIII. MASA SANGGAH

Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. Penjelasan tentang masa sanggah sebagai berikut:

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Panitia Seleksi Daerah dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia Seleksi Daerah dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pada masa sanggah tidak diberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/kekurang-lengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

IX. HELP DESK

1. *Help desk* adalah layanan yang memberikan penjelasan dan informasi terkait permasalahan seleksi pengadaan ASN;
2. *Help desk* Seleksi Pengadaan PPPK Formasi Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lumajang pada menu Tanya Jawab laman <https://bkd.lumajangkab.go.id/>;
3. Layanan informasi permasalahan pendaftaran di SSCASN dapat disampaikan melalui *help desk* laman <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/>.

X. LAIN-LAIN

1. Pelamar dalam mengikuti Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Lumajang Formasi Tahun 2024 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
2. Pelamar tidak disarankan menerima tawaran dari pihak manapun/ yang mengatasnamakan panitia untuk mempermudah diterima sebagai ASN;

3. Terhadap pelamar yang tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur;
4. Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi, tetapi di kemudian hari:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - d. dokumen pelamar yang tidak sesuai ketentuan; atau
 - e. meninggal dunia,maka Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Lumajang Formasi Tahun 2024 membatalkan kelulusannya dan dapat mengganti dengan pelamar yang memiliki peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya.
5. Dalam hal pelamar dikemudian hari terdapat adanya pemalsuan dokumen dan/atau ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Daerah pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun sudah diangkat menjadi PPPK, maka Panitia Seleksi Daerah berhak membatalkan kelulusannya dan memberhentikan status kepegawaiannya.
6. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Lumajang Formasi Tahun 2024 tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan kelalaian pelamar dalam mengakses dan memahami informasi yang terdapat pada laman :
 - a. <https://sscasn.bkn.go.id/>; dan
 - b. <https://bkd.lumajangkab.go.id/>

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di Lumajang
Pada tanggal 30 September 2024
a.n BUPATI LUMAJANG
SEKRETARIS DAERAH
selaku
Ketua Panitia Seleksi Daerah
Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2024



Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004

LAMPIRAN PENGUMUMAN NOMOR 800.1.2.2/51/427.72/2024
TENTANG SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNSIONAL TEKNIS**

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
1.	Satuan Polisi Pamong Praja	Pemadam Kebakaran Pemula	SLTA/SMA Sederajat	5	1 Surat Keterangan Sehat 2 Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas	Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditandatangani oleh Pejabat Kementerian Dalam Negeri	10%	Sertifikat yang telah diregistrasi dan mendapatkan kode verifikasi oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dan dapat diakses melalui tautan https://registrasisidamkar.kemendagri.go.id
						Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	5%	
						Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan	2%	
2.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	D-IV Manajemen - D-IV Ilmu Ekonomi - D-IV Administrasi Negara - D-IV Hukum - D-IV Arsitektur - D-IV Administrasi Publik - D-IV Planologi - D-IV Administrasi Bisnis - S-1 Administrasi Negara - S-1 Teknik Informatika - S-1 Ekonomi - S-1 Manajemen - D-IV Jasa Konstruksi - S-1 Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota - S-1 Teknik Mesin - S-1 Arsitektur - S-1 Hukum -	1		Memiliki Ijazah Profesi Insinyur dari perguruan tinggi yang telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk menyelenggarakan program profesi insinyur; atau Memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) dari Dewan Arsitek Indonesia (DAI) yang masih berlaku; atau Minimal memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Konstruksi Ahli Muda dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang masih berlaku pada sub klasifikasi berikut : 1 Arsitek 2 Ahli Desain Interior 3 Ahli Arsitektur Lansekap 4 Teknik Iluminasi	10%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
			S-1 Sosiologi - S-1 Administrasi Bisnis - S-1 Planologi - S-1 Administrasi Publik			5 Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan 6 Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan 7 Ahli Geoteknik 8 Ahli Geodesi 9 Ahli Teknik Mekanikal 10 Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi 11 Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik 12 Ahli Teknik Proteksi Kebakaran 13 Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung 14 Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gedung 15 Ahli Teknik Lingkungan 16 Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 17 Ahli Manajemen Konstruksi 18 Ahli Manajemen Proyek 19 Ahli K3 Konstruksi 20 Ahli Sistem Manajemen Mutu atau memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang masih berlaku untuk jabatan; jabatan kerja sebagai berikut : 1 Asisten Pemula Arsitek 2 Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Utama 3 Juru Hitung Kuantitas Utama 4 Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung 5 Koordinator BIM 6 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung 7 Manajer Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal 8 Pelaksana Erection Girder 9 Pelaksana Launching Gantry 10 Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas Umum Utama 11 Pengawas Konstruksi, Fabrikasi, Sipil dan Struktur 12 Pengawas Pekerjaan Interior Madya 13 Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung 14 Pengawas Pekerjaan Struktur		

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
						15 Bangunan Gedung Utama Pengawas Pekerjaan Teknik Perpipaan Utama 16 Perencana Struktur Bangunan RISHA 17 Quality Assurance Engineer 18 Quality Engineer 19 Quantity Surveyor Utama 20 Supervisor K3 Konstruksi Utama 21 Supervisor Perawatan Gedung Bertingkat Utama 22 Surveyor Rekayasa 23 Surveyor Terestris 24 Teknisi Geoteknik 25 Teknisi Laboratorium Beton Utama 26 Teknisi Laboratorium Tanah Utama 27 Ahli Desain Interior (Freshgraduate) 28 Ahli Geoteknik (Freshgraduate) 29 Ahli Iluminasi (Freshgraduate) 30 Ahli Muda Bangunan Gedung Hijau 31 Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi 32 Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal 33 Ahli Muda Bidang Teknik Perpipaan 34 Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung 35 Ahli Muda Geoteknik 36 Ahli Muda Grouting 37 Ahli Muda K3 Konstruksi 38 Ahli Muda Keselamatan Konstruksi 39 Ahli Muda Launching Girder 40 Ahli Muda Manajemen Proyek Konstruksi 41 Ahli Muda Pelaksana Teknik Plambing 42 Ahli Muda Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan 43 Ahli Muda Pengelola Rumah Susun 44 Ahli Muda Penilai Bangunan Hijau 45 Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung 46 Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung 47 Ahli Muda Perencana Pondasi 48 Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota 49 Ahli Muda Perencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil 50 Ahli Muda Perencanaan Iluminasi 51 Ahli Muda Perencanaan Sistem Tata		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
						Udara		
						52 Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator		
						53 Ahli Muda Quantity Surveyor		
						54 Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi		
						55 Ahli Muda Survei Pemetaan Udara		
						56 Ahli Muda Survei Terestris		
						57 Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung		
						58 Ahli Muda Teknik Plumbing dan Pompa Mekanik		
						59 Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (Freshgraduate)&		
						60 Ahli Teknik Bangunan Gedung (Freshgraduate)		
						61 Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi dalam Gedung (Freshgraduate)		
						62 Ahli Teknik Mekanikal (Freshgraduate)		
						63 Ahli Teknik Transportasi dalam Gedung (Freshgraduate)		
						64 Arsitek Muda Interior		
						65 Asisten Arsitek		
						66 Asisten Arsitek (Freshgraduate)		
						67 Desain Interior Ahli Muda		
						68 Manager BIM Muda		
						69 Manager Proyek Survei dan Pemetaan Wilayah		
						70 Manajer Logistik Proyek		
						71 Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung		
						72 Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara		
						73 Pengkaji Muda Teknis Proteksi Kebakaran		
						74 Penyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah		
						75 Perancang Lanskap Muda		
						76 Spesialis SIG		
						77 Ahli Madya Bangunan Gedung Hijau		
						78 Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi		
						79 Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal		
						80 Ahli Madya Bidang Teknik Perpipaian		
						81 Ahli Madya Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung		
						82 Ahli Madya Geologi Pekerjaan Konstruksi		
						83 Ahli Madya Geoteknik		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
						84 Ahli Madya Grouting 85 Ahli Madya K3 Konstruksi 86 Ahli Madya Keselamatan Konstruksi 87 Ahli Madya Kewilayahan 88 Ahli Madya Launching Girder 89 Ahli Madya Manajemen Proyek Konstruksi 90 Ahli Madya Pelaksana Teknik Plumbing 91 Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan 92 Ahli Madya Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung 93 Ahli Madya Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung Bertingkat 94 Ahli Madya Penilai Bangunan Hijau 95 Ahli Madya Penilai Kegagalan Bangunan Gedung 96 Ahli Madya Penyusunan Peraturan Zonasi 97 Ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung 98 Ahli Madya Perencana Pondasi 99 Ahli Madya Perencana Proyek Infrastruktur 100 100 Ahli Madya Perencana Ruang Terbuka Hijau 101 Ahli Madya Perencana Tata Bangunan dan Lingkungan 102 Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota 103 Ahli Madya Perencanaan Iluminasi 104 Ahli Madya Perencanaan Sistem Tata Udara 105 Ahli Madya Pesawat Lift dan Eskalator 106 Ahli Madya Quantity Surveyor 107 Ahli Madya Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung 108 Ahli Madya Sistem Informasi Geografis 109 Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi 110 Ahli Madya Survei Terestris 111 Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung 112 Ahli Madya Teknik Plumbing dan Pompa Mekanik 113 Arsitek Madya 114 Arsitek Madya Interior 115 Desain Interior Ahli Madya 116 Manager BIM Madya		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
						117 Manajer Alat Berat 118 Pengkaji Madya Teknis Proteksi Kebakaran 119 Perancang Lanskap Madya 120 Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung 121 Ahli Geodesi Dan Bangunan Gedung 122 Ahli Geologi Pekerjaan Konstruksi 123 Ahli Geoteknik 124 Ahli Pelaksana Teknik Plambing 125 Ahli Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan 126 Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung 127 Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung Bertingkat 128 Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung 129 Ahli Penilai Bangunan Hijau 130 Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung 131 Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar) 132 Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi 133 Ahli Perawatan Bangunan Gedung 134 Ahli Perencana Proyek Infrastruktur 135 Ahli Perencana Ruang Terbuka Hijau 136 Ahli Perencana Tata Bangunan dan Lingkungan 137 Ahli Perencanaan Iluminasi 138 Ahli Perencanaan Sistem Tata Udara 139 Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung 140 Ahli Rekayasa Nilai (Value Engineering) 141 Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi 142 Ahli Teknik Bangunan Gedung 143 Ahli Utama Bangunan Gedung Hijau 144 Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi 145 Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Mekanikal 146 Ahli Utama Bidang Teknik Perpipaian 147 Ahli Utama K3 Konstruksi 148 Ahli Utama Keselamatan Konstruksi 149 Ahli Utama Kewilayahan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
						150 Ahli Utama Manajemen Proyek Konstruksi 151 Ahli Utama Perencana Pondasi 152 Ahli Utama Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota 153 Ahli Utama Pesawat Lift dan Eskalator 154 Ahli Utama Quantity Surveyor 155 Ahli Utama Survei Terestris 156 Ahli Utama Teknik Plumbing dan Pompa Mekanik 157 Arsitek Utama 158 Arsitek Utama Interior 159 Desain Interior Ahli Utama 160 Pengkaji Teknis Proteksi Kebakaran 161 Perancang Lanskap		
3.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	D-IV Teknik Lingkungan - D-IV Hukum - D-IV Teknik Material - D-IV Teknik Geodesi - D-IV Arsitektur - D-IV Administrasi Publik - D-IV Ilmu Informatika - D- IV Teknik Sipil - D-IV Teknik Elektro - S-1 Teknik Geodesi - S-1 Ekonomi - S-1 Teknik Sipil - S-1 Arsitektur - S-1 Teknik Lingkungan - S-1 Teknik Material - S-1 Hukum - S-1 Teknik Elektro - S-1 Administrasi Publik	1		Memiliki Ijazah Profesi Insinyur dari perguruan tinggi yang telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk menyelenggarakan program profesi insinyur; atau minimal memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level-1 yang masih berlaku dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; atau Minimal memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Konstruksi Ahli Muda dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang masih berlaku pada sub klasifikasi berikut : 1 Ahli Manajemen Konstruksi 2 Ahli Manajemen Proyek 3 Ahli K3 Konstruksi 4 Ahli Sistem Manajemen Mutu 5 Ahli Teknik Lingkungan 6 Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota atau memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang masih berlaku untuk jabatan; jabatan kerja sebagai berikut : 1 Juru Hitung Kuantitas Utama 2 Quality Assurance Engineer 3 Quality Engineer 4 Supervisor K3 Konstruksi Utama 5 Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen	10%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
						6 Konstruksi 7 Ahli Muda K3 Konstruksi 8 Ahli Muda Keselamatan Konstruksi 8 Ahli Muda Manajemen Proyek Konstruksi 9 Ahli Muda Penilai Bangunan Hijau 10 Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota 11 Ahli Muda Quantity Surveyor 12 Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi 13 Ahli Muda Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi 14 Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (Freshgraduate)& 15 Manajer Logistik Proyek 16 Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi 17 Ahli Madya K3 Konstruksi 18 Ahli Madya Keselamatan Konstruksi 19 Ahli Madya Kontrak Kerja Konstruksi 20 Ahli Madya Manajemen Proyek Konstruksi 21 Ahli Madya Penilai Bangunan Hijau 22 Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota 23 Ahli Madya Quantity Surveyor 24 Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi 25 Ahli Madya Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi 26 Ahli Kontrak Kerja Konstruksi 27 Ahli Penilai Bangunan Hijau 28 Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi 29 Ahli Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi 30 Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi 31 Ahli Utama K3 Konstruksi 32 Ahli Utama Keselamatan Konstruksi 33 Ahli Utama Manajemen Proyek Konstruksi 34 Ahli Utama Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota 35 Ahli Utama Quantity Surveyor		
4.	Sekretariat Daerah, Bagian Pengadaan	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	D-IV Keuangan Publik - D-IV Akuntansi Perpajakan - D-IV Analisis Keuangan -	3		Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar atau Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa	10%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
	Barang Dan Jasa	Ahli Pertama	S-1 Sistem Dan Teknologi Informasi -S-1 Bisnis - S-1 Sistem Informasi - S-1 Ilmu Informatika - S-1 Akuntansi - S-1 Teknik Komputer -S-1 Manajemen - S-1 Rekayasa Komputer - S-1 Teknik Sipil - S-1 Teknik Telekomunikasi - S-1 Teknik Industri - S-1 Pendidikan Matematika - S-1 Pendidikan Akuntansi - S-1 Pendidikan Bisnis - S-1 Pendidikan Komputer - S-1 Pendidikan Ekonomi - S-1 Ilmu Komputer - S-1 Administrasi Bisnis - S-1 Teknik Elektro - S-1 Hukum Syariah - S-1 Ekonomi Syariah - S-1 Hukum Bisnis - S-1 Rekayasa Telekomunikasi - S-1 Administrasi Publik - S-1 Ilmu Pemerintahan			Pemerintah Level-1 yang diterbitkan oleh LKPP		
5.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	D-IV Teknik Fisika - D-IV Arsitektur - D-IV Perencanaan Wilayah Dan Kota - D-IV Teknik Sipil - D-IV Teknik Mesin - D-IV Teknik Elektro - S-1 Perencanaan Wilayah - D-IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung - S-1 Teknik Sipil - S-1 Teknik Pengairan - S-1 Teknik Fisika - S-1 Teknik Mesin - S-1 Arsitektur - S-1 Teknik Lingkungan - S-1 Desain Interior - S-1 Teknik Elektro - S-1 Planologi - S-1 Perencanaan Kota - S-1 Teknik Sipil	1		Memiliki Ijazah Profesi Insinyur dari perguruan tinggi yang telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk menyelenggarakan program profesi insinyur; atau Memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) dari Dewan Arsitek Indonesia (DAI) yang masih berlaku; atau Minimal memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Konstruksi Ahli Muda dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang masih berlaku pada sub klasifikasi berikut : 1 Arsitek 2 Ahli Desain Interior 3 Ahli Arsitektur Lansekap 4 Teknik Iluminasi 5 Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan 6 Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan	10%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
			Perancangan Jalan Dan Jembatan			7 Ahli Geoteknik 8 Ahli Geodesi 9 Ahli Teknik Mekanikal 10 Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi 11 Ahli Teknik Plumbing dan Pompa Mekanik 12 Ahli Teknik Proteksi Kebakaran 13 Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung 14 Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gedung 15 Ahli Teknik Lingkungan 16 Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 17 Ahli Manajemen Konstruksi 18 Ahli Manajemen Proyek 19 Ahli K3 Konstruksi 20 Ahli Sistem Manajemen Mutu atau memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang masih berlaku untuk jabatan; jabatan kerja sebagai berikut : 1 Asisten Pemula Arsitek 2 Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Utama 3 Juru Hitung Kuantitas Utama 4 Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung 5 Koordinator BIM 6 Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung 7 Manajer Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal 8 Pelaksana Erection Girder 9 Pelaksana Launching Gantry 10 Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas Umum Utama 11 Pengawas Konstruksi, Fabrikasi, Sipil dan Struktur 12 Pengawas Pekerjaan Interior Madya 13 Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung 14 Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama 15 Pengawas Pekerjaan Teknik Perpipaan Utama		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
						16 Perencana Struktur Bangunan RISHA 17 Quality Assurance Engineer 18 Quality Engineer 19 Quantity Surveyor Utama 20 Supervisor K3 Konstruksi Utama 21 Supervisor Perawatan Gedung Bertingkat Utama 22 Surveyor Rekayasa 23 Surveyor Terestris 24 Teknisi Geoteknik 25 Teknisi Laboratorium Beton Utama 26 Teknisi Laboratorium Tanah Utama 27 Ahli Desain Interior (Freshgraduate) 28 Ahli Geoteknik (Freshgraduate) 29 Ahli Iluminasi (Freshgraduate) 30 Ahli Muda Bangunan Gedung Hijau 31 Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi 32 Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal 33 Ahli Muda Bidang Teknik Perpipaan 34 Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung 35 Ahli Muda Geoteknik 36 Ahli Muda Grouting 37 Ahli Muda K3 Konstruksi 38 Ahli Muda Keselamatan Konstruksi 39 Ahli Muda Launching Girder 40 Ahli Muda Manajemen Proyek Konstruksi 41 Ahli Muda Pelaksana Teknik Plambing 42 Ahli Muda Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan 43 Ahli Muda Penilai Bangunan Hijau 44 Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung 45 Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung 46 Ahli Muda Perencana Pondasi 47 Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota 48 Ahli Muda Perencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil 49 Ahli Muda Perencanaan Iluminasi 50 Ahli Muda Perencanaan Sistem Tata Udara 51 Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator 52 Ahli Muda Quantity Surveyor 53 Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
						Konstruksi 54 Ahli Muda Survei Pemetaan Udara 55 Ahli Muda Survei Terestris 56 Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung 57 Ahli Muda Teknik Plambing dan Pompa Mekanik 58 Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (Freshgraduate)& 59 Ahli Teknik Bangunan Gedung (Freshgraduate) 60 Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi dalam Gedung (Freshgraduate) 61 Ahli Teknik Mekanikal (Freshgraduate) 62 Ahli Teknik Transportasi dalam Gedung (Freshgraduate) 63 Arsitek Muda Interior 64 Asisten Arsitek 65 Asisten Arsitek (Freshgraduate) 66 Desain Interior Ahli Muda 67 Manager BIM Muda 68 Manager Proyek Survei dan Pemetaan Wilayah 69 Manajer Logistik Proyek 70 Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung 71 Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara 72 Pengkaji Muda Teknis Proteksi Kebakaran 73 Penyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 74 Perancang Lanskap Muda 75 Spesialis SIG 76 Ahli Madya Bangunan Gedung Hijau 77 Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi 78 Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal 79 Ahli Madya Bidang Teknik Perpipaian 80 Ahli Madya Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung 81 Ahli Madya Geologi Pekerjaan Konstruksi 82 Ahli Madya Geoteknik 83 Ahli Madya Grouting 84 Ahli Madya K3 Konstruksi 85 Ahli Madya Keselamatan Konstruksi 86 Ahli Madya Kewilayahan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
						87 Ahli Madya Launching Girder 88 Ahli Madya Manajemen Proyek Konstruksi 89 Ahli Madya Pelaksana Teknik Plumbing 90 Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan 91 Ahli Madya Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung 92 Ahli Madya Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung Bertingkat 93 Ahli Madya Penilai Bangunan Hijau 94 Ahli Madya Penilai Kegagalan Bangunan Gedung 95 Ahli Madya Penyusunan Peraturan Zonasi 96 Ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung 97 Ahli Madya Perencana Pondasi 98 Ahli Madya Perencana Proyek Infrastruktur 99 Ahli Madya Perencana Ruang Terbuka Hijau 100 Ahli Madya Perencana Tata Bangunan dan Lingkungan 101 Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota 102 Ahli Madya Perencanaan Iluminasi 103 Ahli Madya Perencanaan Sistem Tata Udara 104 Ahli Madya Pesawat Lift dan Eskalator 105 Ahli Madya Quantity Surveyor 106 Ahli Madya Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung 107 Ahli Madya Sistem Informasi Geografis 108 Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi 109 Ahli Madya Survei Terestris 110 Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung 111 Ahli Madya Teknik Plumbing dan Pompa Mekanik 112 Arsitek Madya 113 Arsitek Madya Interior 114 Desain Interior Ahli Madya 115 Manager BIM Madya 116 Manajer Alat Berat 117 Pengkaji Madya Teknis Proteksi Kebakaran 118 Perancang Lanskap Madya		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
						119 Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung 120 Ahli Geodesi Dan Bangunan Gedung 121 Ahli Geologi Pekerjaan Konstruksi 122 Ahli Geoteknik 123 Ahli Pelaksana Teknik Plambing 124 Ahli Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan 125 Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung 126 Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung Bertingkat 127 Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung 128 Ahli Penilai Bangunan Hijau 129 Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung 130 Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar) 131 Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi 132 Ahli Perawatan Bangunan Gedung 133 Ahli Perencana Proyek Infrastruktur 134 Ahli Perencana Ruang Terbuka Hijau 135 Ahli Perencana Tata Bangunan dan Lingkungan 136 Ahli Perencanaan Iluminasi 137 Ahli Perencanaan Sistem Tata Udara 138 Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung 139 Ahli Rekayasa Nilai (Value Engineering) 140 Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi 141 Ahli Teknik Bangunan Gedung 142 Ahli Utama Bangunan Gedung Hijau 143 Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi 144 Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Mekanikal 145 Ahli Utama Bidang Teknik Perpipaan 146 Ahli Utama K3 Konstruksi 147 Ahli Utama Keselamatan Konstruksi 148 Ahli Utama Kewilayahan 149 Ahli Utama Manajemen Proyek Konstruksi 150 Ahli Utama Perencana Pondasi 151 Ahli Utama Perencana Tata Ruang		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
						Wilayah dan Kota 152 Ahli Utama Pesawat Lift dan Eskalator 153 Ahli Utama Quantity Surveyor 154 Ahli Utama Survei Terestris 155 Ahli Utama Teknik Plumbing dan Pompa Mekanik 156 Arsitek Utama 157 Arsitek Utama Interior 158 Desain Interior Ahli Utama 159 Pengkaji Teknis Proteksi Kebakaran 160 Perancang Lanskap		
6.	Dinas Perikanan	Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	D-IV Biologi - D-IV Teknologi Pangan - D-IV Ilmu Gizi - D-IV Perikanan - D-IV Ilmu Pangan - S-1 Ilmu Gizi - S-1 Perikanan - S-1 Kimia - S-1 Biologi - S-1 Ilmu Pangan	2		Sertifikasi Kluster Pembuatan Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan yang diterbitkan oleh BNSP-LSPKP dengan masa berlaku 3 tahun	10%	
7.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Pustakawan	D-IV Perpustakaan Digital - S-1 Ilmu Perpustakaan - S-1 Ilmu Informasi Dan Perpustakaan - S-1 Ilmu Perpustakaan Dan Informasi - S-1 Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam - S-1 Perpustakaan Dan Sains Informasi	1		Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh LSP Pustakawan yang masih berlaku atau tidak lebih dari 3 tahun sejak diterbitkan, dengan salah satu kluster sebagai berikut: 1 Kluster Pelaksanaan Pengembangan Koleksi Perpustakaan; 2 Kluster Pelaksanaan Evaluasi Pengembangan Koleksi Perpustakaan; 3 Kluster Pelaksanaan Pengatalogan Deskriptif; 4 Kluster Pelaksanaan Pengatalogan Berbasis Komputer; 5 Kluster Pelaksanaan Pengatalogan Subjek; 6 Kluster Layanan Dasar Perpustakaan; 7 Kluster Layanan Perpustakaan Untuk Anak; 8 Kluster Layanan Perpustakaan Untuk Remaja; 9 Kluster Pelaksanaan Promosi Layanan Perpustakaan; 10 Kluster Pengembangan Kemampuan Literasi Informasi; 11 Kluster Layanan Perpustakaan Untuk Lansia; 12 Kluster Layanan Perpustakaan untuk Komunitas;	10%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
						13 Klaster Layanan Khusus Perpustakaan; atau 14 Klaster Layanan Perpustakaan untuk Penyandang Disabilitas.		
8.	Dinas Perikanan	Analisis Akuakultur	S-1 Akuakultur - S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan - S-1 Budidaya Perairan - S-1 Teknologi Dan Manajemen Perikanan Budidaya - S-1 Kimia - S-1 Biologi - S-1 Ilmu Perikanan - S-1 Analisis Kimia - S-1 Teknologi Akuakultur - S-1 Perikanan Budidaya - S-1 Sumber Daya Perairan	1		Sertifikat Skema Budidaya Perikanan yang diterbitkan oleh BNSP-LSPKP dengan masa berlaku 3 tahun	10%	
9.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D-IV Teknik Lingkungan - D-IV Teknik Sipil - S-1 Teknik Sipil - S-1 Teknik Lingkungan	1		Memiliki Ijazah Profesi Insinyur dari perguruan tinggi yang telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk menyelenggarakan program profesi insinyur; atau Minimal memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Konstruksi Ahli Muda dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang masih berlaku pada sub klasifikasi berikut : 1 Ahli Geoteknik 2 Ahli Geodesi 3 Ahli Teknik Lingkungan 4 Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 5 Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah 6 Ahli Teknik Air Minum 7 Ahli Manajemen Konstruksi 8 Ahli Manajemen Proyek	10%	
10.	Sekretariat Dprd	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	S-1 Akuntansi - S-1 Ekonomi - S-1 Manajemen - S-1 Hukum - S-1 Ilmu Politik - S-1 Administrasi Publik	1				
11.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D-IV Studi Kebijakan Publik - D-IV Politik Indonesia Terapan -	2				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
			D-IV Kebijakan Dan Manajemen Pajak - S-1 Akuntansi - S-1 Ekonomi - S-1 Manajemen - S-1 Politik Islam - S-1 Administrasi Pajak - S-1 Hukum - S-1 Ilmu Politik - S-1 Administrasi Bisnis - S-1 Hubungan Internasional - S-1 Hubungan Masyarakat					
12.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	D-IV Politik Indonesia Terapan - D-IV Kebijakan Dan Manajemen Pajak - S-1 Hukum Islam - S-1 Manajemen - S-1 Politik Islam - S-1 Kebijakan Pendidikan - S-1 Administrasi Pajak - S-1 Hukum - S-1 Ekonomi Islam - S-1 Ilmu Politik - S-1 Administrasi Bisnis - S-1 Hubungan Internasional - S-1 Hubungan Masyarakat - S-1 Administrasi Publik	2				
13.	Badan Pajak Dan Retribusi Daerah	Operator Layanan Operasional	SLTA/SMA Sederajat	1				
14.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	D-IV Manajemen Penanggulangan Bencana Dan Kegawatdaruratan - S-1 Manajemen - S-1 Manajemen Bencana - S-1 Teknik Sipil - S-1 Arsitektur - S-1 Teknik Geologi - S-1 Teknik Lingkungan - S-1 Psikologi - S-1 Sosiologi - S-1 Geografi - S-1 Ekonomi Pembangunan	1				

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
15.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	D-IV Manajemen Penanggulangan Bencana Dan Kegawatdaruratan - S-1 Ekonomi - S-1 Manajemen - S-1 Teknik Sipil - S-1 Teknik Geologi - S-1 Teknik Lingkungan - S-1 Hukum - S-1 Administrasi Publik	2				
16.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perencana Ahli Pertama	S-1 Akuntansi - S-1 Ekonomi - S-1 Hukum Islam - S-1 Manajemen - S-1 Ilmu Sosial - S-1 Teknik - S-1 Hukum - S-1 Administrasi	1				
17.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	D-IV Manajemen Penanggulangan Bencana Dan Kegawatdaruratan - S-1 Manajemen - S-1 Manajemen Bencana - S-1 Teknik Sipil - S-1 Arsitektur - S-1 Teknik Geologi - S-1 Teknik Lingkungan - S-1 Psikologi - S-1 Sosiologi - S-1 Geografi - S-1 Ekonomi Pembangunan	1				
18.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	D-IV Manajemen Penanggulangan Bencana Dan Kegawatdaruratan - S-1 Ekonomi - S-1 Manajemen - S-1 Perencanaan Wilayah Dan Kota - S-1 Arsitektur - S-1 Hukum - S-1 Psikologi - S-1 Kesehatan Masyarakat - S-1 Statistika - S-1 Administrasi Publik	1				
19.	Badan Penanggulangan	Pranata Komputer	D-III Teknologi Informasi - D-III Sistem Informasi -	1				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
	n Bencana Daerah	Terampil	D-III Teknik Informatika					
20.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	D-IV Manajemen Penanggulangan Bencana Dan Kegawatdaruratan - S-1 Ekonomi - S-1 Manajemen - S-1 Teknik Sipil - S-1 Teknik Geologi - S-1 Teknik Lingkungan - S-1 Hukum - S-1 Administrasi Publik	2				
21.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	D-IV Manajemen Penanggulangan Bencana Dan Kegawatdaruratan - S-1 Ekonomi - S-1 Manajemen - S-1 Teknik Sipil - S-1 Teknik Geologi - S-1 Teknik Lingkungan - S-1 Hukum - S-1 Administrasi Publik	1				
22.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Pengelola Layanan Operasional	D-III Manajemen - D-III Administrasi - D-III Teknik Informatika	2				
23.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA/SMA Sederajat	1				
24.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Pengelola Layanan Operasional	D-III Manajemen - D-III Administrasi - D-III Teknik Informatika	2				
25.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Perencana Ahli Pertama	S-1 Akuntansi - S-1 Ekonomi - S-1 Hukum Islam - S-1 Manajemen - S-1 Ilmu Sosial - S-1 Hukum - S-1 Administrasi - S-1 Ekonomi Islam - S-1 Hukum Syariah - S-1 Ekonomi Syariah - S-1 Ilmu Politik Dan Pemerintahan -	1				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
			S-1 Ilmu Hukum					
26.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Arsiparis Ahli Pertama	S-1 Ekonomi - S-1 Sastra Inggris - S-1 Manajemen - S-1 Ilmu Sosial - S-1 Pendidikan - S-1 Sastra Indonesia - S-1 Hukum - S-1 Administrasi - S-1 Kearsipan	5				
27.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pranata Komputer Terampil	D-III Teknologi Informasi - D-III Sistem Informasi - D-III Teknik Informatika	4				
28.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	S-1 Teknik Komputer - S-1 Ilmu Komputer - S-1 Teknologi Informasi	1				
29.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil	D-III Teknologi Komputer - D-III Teknologi Informasi - D-III Sistem Informasi - D-III Teknologi Komputer Grafis	1				
30.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Perencana Ahli Pertama	S-1 Akuntansi - S-1 Ekonomi - S-1 Fakultas Kesehatan Masyarakat - S-1 Manajemen - S-1 Ilmu Sosial - S-1 Teknik - S-1 Hukum - S-1 Administrasi	1				
31.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S-1 Ilmu Komunikasi	3				
32.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Pranata Komputer Terampil	D-III Teknologi Informasi - D-III Sistem Informasi - D-III Teknik Informatika	1				
33.	Dinas Lingkungan Hidup	Pengendali Dampak Lingkungan	S-1 Ilmu Hama Dan Penyakit Tanaman - S-1 Teknik Penyehatan	3				

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
		Ahli Pertama	Lingkungan - S-1 Teknik Geodesi - S-1 Matematika - S-1 Kedokteran Hewan - S-1 Ekonomi - S-1 Peternakan - S-1 Kesehatan Lingkungan - S-1 Ilmu Tanah - S-1 Ilmu Sosial - S-1 Kimia - S-1 Teknik Kimia - S-1 Fisika - S-1 Teknik Lingkungan - S-1 Teknik Industri - S-1 Hukum - S-1 Sosial - S-1 Kesehatan Masyarakat - S-1 Biologi - S-1 Geografi - S-1 Teknik Geofisika - S-1 Ilmu Perikanan					
34.	Dinas Lingkungan Hidup	Pranata Komputer Ahli Pertama	D-IV Teknik Informatika - S-1 Rekayasa Perangkat Lunak - S-1 Teknik Informatika - S-1 Ilmu Komputer - S-1 Teknologi Informasi - S-1 Teknik Elektro	2				
35.	Dinas Pariwisata	Pengelola Layanan Operasional	D-III Pemerintahan - D-III Manajemen - D-III Pariwisata - D-III Administrasi	1				
36.	Dinas Pariwisata	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA/SMA Sederajat	1				
37.	Dinas Pariwisata	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA/SMA Sederajat	1				
38.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Penata Layanan Operasional	D-IV Teknik Arsitektur - D-IV Teknik Sipil - D-IV Rancang Kota - S-1 Teknik Arsitektur - S-1 Teknik Sipil - S-1 Rancang Kota	2				
39.	Dinas Pekerjaan	Pengelola Layanan	D-III Teknik Sipil - D-III Teknik Arsitektur	2				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
	Umum Dan Tata Ruang	Operasional						
40.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA/SMA Sederajat	1				
41.	Dinas Perhubungan	Pengelola Layanan Operasional	D-III Manajemen Teknik Informatika - D-III Manajemen Transportasi Darat - D-III Manajemen - D-III Llaj - D-III Transportasi Darat - D-III Telekomunikasi - D-III Informatika - D-III Transportasi - D-III Manajemen Transportasi	2				
42.	Dinas Perhubungan	Pengelola Layanan Operasional	D-III Llaj - D-III Transportasi Darat - D-III Transportasi	1				
43.	Dinas Perikanan	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	D-IV Penyuluh Perikanan - D-IV Perikanan Dan Ilmu Kelautan - S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan - S-1 Ilmu Kelautan - S-1 Perikanan - S-1 Teknologi Hasil Perikanan - S-1 Sosial Ekonomi Perikanan - S-1 Perikanan Dan Ilmu Kelautan - S-1 Ilmu Perikanan	1				
44.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Pengelola Layanan Operasional	D-III Teknik Sipil - D-III Rancang Kota - D-III Teknik Arsitektur	1				
45.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Penata Layanan Operasional	D-IV Teknik Lingkungan - D-IV Manajemen Transportasi - D-IV Teknik Arsitektur - D-IV Teknik Sipil -	2				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
			D-IV Ketahanan Nasional - D-IV Studi Pembangunan - S-1 Ketahanan Nasional - D-IV Kependudukan - D-IV Teknik Sipil Dan Perencanaan Tata Ruang - S-1 Manajemen Transportasi - S-1 Teknik Arsitektur - S-1 Kependudukan - S-1 Teknik Sipil - S-1 Teknik Lingkungan - S-1 Studi Pembangunan - S-1 Teknik Sipil Dan Perencanaan Tata Ruang - D-IV/S-1 Ekonomi Pembangunan					
46.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Penata Layanan Operasional	S-1/D-IV Teknik Lingkungan - S-1/D-IV Teknik Arsitektur - S-1/D-IV Teknik Sipil	2				
47.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Upt Pengelolaan Air Limbah Domestik	Penata Layanan Operasional	D-IV Administrasi - D-IV Teknik Lingkungan - D-IV Teknik Penyehatan Lingkungan - S-1 Teknik Penyehatan Lingkungan - S-1 Teknik Sipil - S-1 Arsitektur - S-1 Teknik Lingkungan - S-1 Administrasi - D-IV/S-1 Akuntansi - D-IV/S-1 Manajemen - D-IV/S-1 Ekonomi	2				
48.	RSUD dr Haryoto	Pranata Komputer Ahli Pertama	D-IV Teknik Informatika - S-1 Rekayasa Perangkat Lunak - S-1 Teknik Informatika - S-1 Ilmu Komputer - S-1 Teknologi Informasi - S-1 Teknik Elektro	1				
49.	RSUD dr Haryoto	Pengelola Layanan Operasional	D-III Teknik Elektro	1				
50.	Satuan Polisi	Pengelola	D-III Planologi -	1				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
	Pamong Praja	Layanan Operasional	D-III Pemerintahan - D-III Teknik Atau Rekayasa Keselamatan					
51.	Sekretariat Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat	Penata Layanan Operasional	S-1 Hukum Islam - S-1 Administrasi - D-IV/S-1 Akuntansi - D-IV/S-1 Manajemen - D-IV/S-1 Ekonomi	2				
52.	Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA/SMA Sederajat	1				
53.	Sekretariat Daerah, Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Penata Layanan Operasional	D-IV/S-1 Teknik Informatika	1				
54.	Sekretariat Daerah, Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA/SMA Sederajat	1				
55.	Sekretariat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan	Penata Layanan Operasional	S-1 Sistem Informasi - S-1 Administrasi Negara - S-1 Ekonomi - S-1 Administrasi - D-IV/S-1 Akuntansi - D-IV/S-1 Manajemen	1				
56.	Sekretariat Daerah, Bagian Umum	Operator Layanan Operasional	SLTA/SMA Sederajat	1				
57.	Sekretariat Daerah, Bagian Umum	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA/SMA Sederajat	1				

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN**

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
1	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
2	Puskesmas Kunir	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1			
3	RSUD dr Haryoto	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1			
4	Puskesmas Pasirian	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1			
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1			
6	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1			
7	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1			
8	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	2			
9	RSUD Pasirian	Apoteker Ahli Pertama	1	1 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; atau 3 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
10	RSUD dr Haryoto	Apoteker Ahli Pertama	1			
11	RSUD dr Haryoto	Asisten Apoteker Terampil	1	1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
12	RSUD Pasirian	Asisten Apoteker Terampil	1			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN			
				5 Penerima Bantuan; atau Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.					
13	Puskesmas Tunjung	Bidan Ahli Pertama	1	1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan			
14	Puskesmas Ranuyoso	Bidan Ahli Pertama	1						
15	Puskesmas Rogotrunan	Bidan Ahli Pertama	1						
16	RSUD Pasirian	Bidan Ahli Pertama	2						
17	Puskesmas Kedungjajang	Bidan Terampil	1						
18	Puskesmas Yosowilangun	Bidan Terampil	1						
19	Puskesmas Pasrujambe	Bidan Terampil	1						
20	Puskesmas Pasirian	Bidan Terampil	1						
21	RSUD dr Haryoto	Bidan Terampil	1						
22	Puskesmas Gucialit	Bidan Terampil	1						
23	Puskesmas Tempeh	Bidan Terampil	1						
24	RSUD Pasirian	Bidan Terampil	2						
25	RSUD dr Haryoto	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	1				1 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) Kementerian Kesehatan / SK Penempatan; 4 Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) Kementerian Kesehatan/ SK Pendayagunaan; 5 Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 6 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
26	Puskesmas Kedungjajang	Dokter Gigi Ahli Pertama - Dokter Gigi (Umum)	1						
27	UPT Laboratorium Kesehatan	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	1	Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan			
28	RSUD Pasirian	Fisioterapis Terampil	1	1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
				3 Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.		Kesehatan
29	RSUD Pasirian	Nutrisisionis Ahli Pertama	1	1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afiriasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
30	RSUD dr Haryoto	Perawat Ahli Pertama	8	1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 4 Program Afiriasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
31	RSUD Pasirian	Perawat Ahli Pertama	2			
32	Puskesmas Randuagung	Perawat Terampil	1			
33	RSUD dr Haryoto	Perawat Terampil	9			
34	Puskesmas Pronojiwo	Perawat Terampil	1			
35	Puskesmas Sukodono	Perawat Terampil	1			
36	Puskesmas Bades	Perawat Terampil	1			
37	Puskesmas Labruk Kidul	Perawat Terampil	1			
38	Puskesmas Gesang	Perawat Terampil	1			
39	Puskesmas Ranuyoso	Perawat Terampil	1			
40	Puskesmas Pasrujambe	Perawat Terampil	1			
41	Puskesmas Penanggal	Perawat Terampil	1			
42	RSUD Pasirian	Perawat Terampil	3			
43	Puskesmas Candipuro	Perawat Terampil	1			
44	RSUD dr Haryoto	Perekam Medis Ahli Pertama	1	1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 2 Program Afiriasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 3 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
45	RSUD Pasirian	Perekam Medis Ahli Pertama	2			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KETERANGAN
				Piagam Penghargaan		
46	RSUD Pasirian	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1	1 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
47	RSUD dr Haryoto	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	2	2 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan; 3 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 4 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.		
48	RSUD Pasirian	Teknisi Elektromedis Terampil	1	1 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau 2 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
49	Puskesmas Tunjung	Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	1	1 Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
50	Puskesmas Jatiroto	Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	1	2 Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;		
51	Puskesmas Sumbersari	Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	1	3 Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;		
52	RSUD dr Haryoto	Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	1	4 Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau		
53	Puskesmas Tempeh	Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	1	5 Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.		
54	Puskesmas Senduro	Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	1			

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL GURU**

NO	LOKASI UNIT KERJA	JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Ahli Pertama - Guru Matematika	13
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Ahli Pertama - Guru Agama Kristen	1
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Ahli Pertama - Guru Penjasorkes	101
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Ahli Pertama - Guru Bahasa Indonesia	33
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Ahli Pertama - Guru TIK	1
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Ahli Pertama - Guru Agama Hindu	2
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Ahli Pertama - Guru IPS	1
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Ahli Pertama - Guru Prakarya Dan Kewirausahaan	13
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Ahli Pertama - Guru Bahasa Inggris	21
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Ahli Pertama - Guru Seni Budaya	1
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Ahli Pertama - Guru IPA	16
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Ahli Pertama - Guru Kelas-SD	270
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Ahli Pertama - Guru Agama Islam	8
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Ahli Pertama - Guru Bimbingan Konseling	1
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Guru Ahli Pertama - Guru PPKN	5

a.n BUPATI LUMAJANG
SEKRETARIS DAERAH
selaku
Ketua Panitia Seleksi Daerah
Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lumajang
Formasi Tahun 2024



Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004